



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA I DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Rapat Banmus Tanggal 31 Juli 2023 membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser Bulan Juli 2023.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.15/ 437 /DPRD, tanggal 14 Agustus 2023, Perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2023
Pukul : 13.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Hamransyah, SH Selaku Ketua Pansus Raperda I DPRD Kab.Paser.

D. PESERTA RAPAT

Anggota Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser :

1. Basri M, S.Ap
2. Rahmadi, SE
3. Ahmad Rafii, S.T.,M.H

Perangkat Daerah :

1. Badan Pendapatan Daerah
2. Bagian Hukum

E. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pembukaan

Rapat pada hari ini dibuka oleh Hamransyah, SH selaku Ketua Pansus Raperda I DPRD Kab.Paser

Rapat Anggota Pansus Raperda I DPRD Kab. Paser yang hadir dalam rapat sebanyak 4 (empat) orang, 5 (lima) orang ijin.

2. Pembahasan

Raperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Basri M, S. Ap mengatakan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai RDP sebelumnya yang saya pimpin bersama Perangkat Daerah terkait.
 - ✓ Perlu digaris bawahi terkait lampiran, masing-masing OPD dalam pengelolaan pajak dan retribusi ini sudah di sepakati bahwa Bapenda akan berkoordinasi dengan OPD untuk di rapatkan kembali agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan kajian teknis penetapan pajak dan retribusi dan informasinya sudah di rapatkan.
 - ✓ Untuk Bapenda apakah perhitungannya sudah melalui analisis ? jangan sampai kita menetapkan ini memberatkan masyarakat.
 - ✓ Raperda ini sudah sesuai dengan PP no 35 tahun2023
 - ✓ Terkait RSUD , karena di PP no 35 ada cantolannya mengharuskan ada objek dan kita harus menyiapkan dalam raperda ini.
 - ✓ Pada saat RDP kemarin sempat di bahas terkait retribusi sewa gedung Awa Mangkuruku, karena yang kita liat jika kita menaikkan harga sewa, paling tidak pelayanan juga mengikuti. Harapan kami antara retribusi dan pelayanan dapat sejalan di masyarakat. Bagaimana sarana dan prasarananya di perhatikan ketika adanya pemadaman listrik. Bagaian umum harus menyiapkan listrik genset. Setelah ini kami meminta kepada Bapenda untuk secara teknis menyampaikan ke bagian umum agar segala sesuatunya di persiapkan.
 - ✓ Semoga raperda ini bisa segera di paripurnakan dan setelah itu di lakukan harmonisasi ke Kemenkumham RI.
- Hamransyah, SH mengatakan apakah hotel sudah masuk dalam raperda ini ?
Tanggapan Bapenda : Pajak hotel sudah masuk dan untuk hotel Kryad Sadurengas masuk kerjasama.

- Ahmad Rafii ST mengatakan di lampiran pelayanan kesehatan tidak di temukan retribusi pelayanan MRI. Mungkin di Rumah Sakit kita belum ada tetapi tidak menutup kemungkinan satu atau dua tahun kedepan pelayanan itu ada. Hal seperti ini yang semestinya harus dipersiapkan retribusinya.

Tanggapan Bapenda :

Pada saat rapat terakhir, kami sudah meminta semua daftar objeknya dan kami sudah memasukkan semua usulan dari Rumah Sakit. Objek-objek utamanya harus masuk di dalam raperda ini jika ada yang ingin di atur lebih rincikan maka bisa di atur dalam Perkada.

- Ahmad Rafii ST mengatakan retribusi sewa gedung Awa Mangkuruku agar batasan komersial dan non komersial dapat diatur di dalam Perkada. Siapa-siapa yang boleh menggunakan non komersial.
- Hamransyah, SH mengatakan bahwa di UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD di pasal 94 memberikan keleluasaan kepada kita untuk menciptakan ruang-ruang PAD termasuk perhotelan dari sisi pajaknya, retribusinya atau mungkin di perjanjian bagi hasilnya. Apakah ini termasuk pajak apa retribusi atau pendapatan lainnya? Saya minta di update.
- Ahmad Rafii ST menanyakan terkait air bawah tanah, yang dipungut apakah yang sudah memiliki ijin saja atau yang tanpa ijin juga di pungut ? contoh di Balikpapan, mereka memungut juga yang tanpa ijin ketika terjadi masalah, itu tidak bisa dilindungi.

Tanggapan Bapenda :

Sifat pajak seperti itu membayar pajak tidak mesti memiliki lahan selama ada pemanfaatan maka akan di pungut.

- Ahmad Rafii ST mengatakan Undang-Undang baru terkait dengan lingkungan, yang mewajibkan semua perusahaan yang bergerak di perairan memiliki pompa air untuk menyedot minyak atau limbah. Harga pompanya lumayan mahal, kita bisa menarik retribusi terhadap perusahaan yang memiliki pompa tersebut.
- Ahmad Rafii ST menanyakan bagaimana hitungannya reklame yang tempatnya bersifat privat atau pribadi seperti memasang baliho di depan rumah ?

Tanggapan Bapenda :

Tetap dipungut

- Hamransyah SH, menanyakan terkait peruntukannya, tempatnya, apakah Bapenda ikut mengatur tempat pemasangan reklame ? karena pada prinsipnya kami membuat aturan juga harus bisa melindungi bukan hanya melindungi pemasang tetapi melindungi tata ruang kita. Nanti bisa diusulkan agar di atur di dalam Perkada.

Tanggapan Bapenda :

Terkait lokasi pemasangan, yang menentukan wilayahnya adalah Dinas PTSP setelah di setuju baru mereka menyetor pajaknya ke kami.

Tanggapan Hamransyah, SH

Perlu adanya kordinasi antara Bapenda dan PTSP agar bisa sinergi.

- Ahmad Rafii ST, mengatakan pada saat pansus study banding ke Bapenda tenggarong kami melihat mereka mempunyai aplikasi yang bisa diakses langsung terkait dengan inputing pendapatan retribusi setiap hari. Disana terlihat targetnya berapa yang sudah tercapai berapa dan di DPRD bisa memantau langsung.

Tanggapan dari Bapenda :

Tahun ini di perubahan sudah mengusulkan aplikasi 11 jenis pajak untuk pembayaran non tunai setelah itu baru retribusi semua di OPD-OPD terkait.

- Basri M, S. Ap mengatakan ketika kita sudah menetapkan pajak dan retribusinya, paling tidak pelayanannya di masyarakat harus mengikuti. Dan agar Bapenda bisa lebih cermat dalam menggali sumber-sumber pendapat kita.
- Bagian Hukum mengatakan karena materinya sudah mencakup sesuai dengan UU maupun PP serta lampirannya sudah dipenuhi oleh Bapenda maka selanjutnya akan diajukan untuk harmonisasi dan evaluasi.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya

Tanah Paser, 21 Agustus 2023

Pimpinan Rapat,



Hamransyah, SH